

Judul : Wacana satu orang satu akun medsos, mungkinkah?
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Wacana Satu Orang Satu Akun Medsos, Mungkinkah?

Dorongan agar DPR dan Pemerintah membuat regulasi mengenai satu orang mempunyai satu akun media sosial atau medsos terus menguat.

Kemarin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahla secara tegas mendukung kebijakan 'satu orang, satu akun media sosial'. Menurut dia, saat ini marak berbagai penipuan karena mudahnya membuat akun medsos.

"Prioritas utama kita adalah keamanan warga di ruang

digital. Kebijakan ini harus dilihat sebagai benteng pertahanan untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan psikologis akibat penipuan," ujar Farah kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, sebelumnya juga sudah mengusulkan pembuatan aturan satu orang satu akun medsos dan satu nomor ponsel. Bambang mengatakan bahwa media sosial (medsos) saat ini benar-benar terbuka, sehingga sulit untuk menyaring isu yang

benar dan salah.

"Jadi kita kan paham bahwa sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana. Kadang kita juga harus cermat dalam menanggapi isu sosial media itu," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Bambang lantas berpendapat bahwa perlu ada aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di medsos.

Dia mengklaim belajar dari Swiss yang menerapkan aturan bahwa

warganya hanya boleh memiliki satu nomor telepon dan satu akun medsos saja. "Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan, perlu juga single account. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Kami belajar dari Swiss, misalnya, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed," jelasnya.

Senapas, anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh juga mendukung kebijakan satu orang satu akun medsos. Bahkan, usulan itu dilontarkan dari enam bulan yang

lalu. "Perlu ada pembatasan akun medsos," usulnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi kurang sependapat, jika adanya pembatasan akun medsos. Katanya, kebijakan tersebut bakal mengekang kebebasan berekspresi masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Oleh Soleh dan Heru Sutadi mengenai wacana kebijakan satu orang satu akun medsos, berikut wawancaranya.

OLEH SOLEH,
Anggota Komisi I DPR RI

Pembatasan Akun Media Sosial Itu Perlu



“Negara lain, sudah menerapkan prinsip satu orang satu akun, dan mereka tetap bisa maju serta nyaman dalam menggunakan media sosial.

Dorongan agar satu orang mempunyai satu akun medsos terus menguat di Senayan. Tujuannya, karena ingin membatasi akun media sosial palsu (*fake account*). Bagaimana pandangan Anda?

Sejak Juli lalu saya sudah menyampaikan bahwa perlu ada pembatasan terhadap penggunaan *double account* atau akun ganda.

Kemapa Anda begitu getol menyuarakan agar satu orang satu akun medsos?

Karena faktanya, banyak akun akun ganda itu digunakan untuk provokasi, penyebaran kebohongan, bahkan penghasutan.

Jangan biarkan *fake account* merusak ruang digital kita. Karena itu, perlu regulasi yang mendorong pembatasan akun ganda.

Negara lain, sudah menerapkan prinsip satu orang satu akun, dan mereka tetap bisa maju serta nyaman

dalam menggunakan media sosial.

Ada tuduhan jika membatasi satu orang satu akun medsos mengekang kebebasan seseorang?

Kalaupun dianggap mengurangi kebebasan pengguna, saya berpandangan setiap akun harus jelas alamat dan identitasnya. Sehingga jika muncul persoalan hukum, bisa langsung ditelusuri dan diklarifikasi.

Apa upaya Anda agar kebijakan satu orang satu akun medsos disahkan?

Saya akan memperjuangkan agar ekosistem digital di Indonesia lebih ramah, sehat, dan bebas dari akun-akun palsu yang merugikan masyarakat agar masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyerahan yang sedang berjalan.

Bagaimana Anda melihat sikap

Pemerintah khususnya Komdigi dalam mengantisipasi akun ganda tersebut?

Komdigi sebenarnya memiliki kewenangan melakukan kontrol hingga penutupan akun-akun ilegal. Namun, dalam rapat dengar pendapat, kami melihat Komdigi masih ragu-ragu.

Mereka hanya berani melakukan *take down* pada konten judi online dan pornografi, sementara konten hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian masih harus menunggu izin instansi terkait. Padahal Komdigi sudah diberi kewenangan penuh untuk bertindak tegas.

Platform digital harus tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai entitas bisnis, platform seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kalau tujuannya bisnis dan profit, maka berilah kenyamanan untuk Indonesia. ■ REN

HERU SUTADI,
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute

Bukan Membatasi Akun, Tapi Perkuat Regulasi



“Jika aturan satu orang satu akun dipaksakan, bisa saja justru mengekang kebebasan berekspresi dan mempersulit aktivitas digital yang sah.

Apa respons dan pandangan Anda terkait dorongan agar satu orang mempunyai satu akun medsos?

Membatasi satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial cenderung menarik jika tujuannya untuk mengurangi penyalahgunaan, seperti hoaks, penipuan atau akun palsu. Namun, dalam praktiknya hal ini tidak sederhana.

Kenapa tidak sederhana?

Media sosial adalah ruang ekspresi. Setiap orang bisa menuliskan identitas pribadi, profesional hingga komunitas. Banyak orang sengaja membuat akun berbeda untuk melindungi privasi atau menyalurkan hobi tertentu.

Jika kebijakan ini tetap dipaksakan. Bagaimana?

Jika aturan satu orang satu akun dipaksakan, bisa saja justru mengekang kebebasan berekspresi dan memper-

sulit aktivitas digital yang sah.

Tantangannya juga ada pada bagaimana memverifikasi identitas tanpa melanggar perlindungan data pribadi.

Apa solusi yang Anda tawarkan?

Yang lebih realistis mungkin bukan membatasi jumlah akun, melainkan memperkuat regulasi dan sistem verifikasi agar penyalahgunaan bisa ditekan, sambil tetap menjaga kebebasan dan kenyamanan pengguna.

Jadi, solusi sebaiknya menyeimbangkan antara keamanan, privasi dan kebebasan digital.

Anda menyarankan agar memperkuat regulasi. Bagaimana caranya?

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan guna memperkuat regulasi soal media sosial tanpa harus membatasi jumlah akun yang dimiliki seseorang.

Pertama, platform perlu diwajibkan memiliki sistem verifikasi yang lebih baik, misalnya dengan nomor telepon atau identitas digital, sehingga pemilik akun tetap bisa dibesarkan bila ada pelanggaran.

Kedua, regulasi harus menekankan transparansi dimana platform wajib cepat menindak laporan akun palsu, penipuan atau ujaran kebencian.

Ketiga, pemerintah bisa mendorong adanya standar perlindungan data yang ketat agar proses verifikasi tidak malah membuka celah penyalahgunaan informasi pribadi.

Keempat, literasi digital juga bagian penting dari regulasi, karena aturan tanpa edukasi akan sulit berjalan. Jadi penguatan regulasi tidak semata soal membatasi, melainkan menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan dan adil, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi warga. ■ REN